

# KONSEPSI POLITIK SARINAH SEBAGAI POLITIK PEMBEBASAN

## Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi dalam Politik Lokal

Sulistia Pratiwi, Subur Bahri, Hary Priyanto

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG Banyuwangi

E-mail: nasulistiabe@gmail.com

**Abstract:** *The Conception of Political Sarinah As Political Freedom; A Study of The Banyuwangi Women's Emancipation at Local Politics.* Political Sarinah as political freedom is a strategy and an act which are done by the women to change patriarchy view that attach on them. Thus, the Banyuwangi women are able to rise up as a leader. The purpose of this study were to identify and describe the strategy of the women's emancipation in order to get authority at the Banyuwangi Government. This research was descriptive qualitative research and the data collection was conducted through observation, interview (semi-structured interview) and documentation. Moreover, the result of the study showed that the women's political strategy in Banyuwangi was based on eight aspects. First, the planning aspect, which was they had a perfect plan before they joined political social field. Second, the organizing aspect, which was they had been trained themselves by joining organization. Third, the actuating aspect, which was they implemented their victory strategy persistently and systematically. Fourth, the controlling aspect, which was they did not do supervisory optimally. Fifth, the strengths aspect, which was they tended to be ambitious with their ability. Sixth, the weakness aspect, which was men tended to be disagree with women's leader. Seventh, the opportunities aspect, which was the Banyuwangi women had been educated and experienced. The last, threaten aspect, which was the Banyuwangi men acknowledged women's politic so there was no threat for women's leader.

**Keywords:** *Women, Political Sarinah, Political Freedom, Banyuwangi*

**Abstrak:** **Konsepsi Politik Sarinah sebagai Politik Pembebasan; Studi pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi dalam Politik Lokal.** Politik Sarinah sebagai politik pembebasan merupakan strategi dan tindakan yang dilakukan oleh perempuan untuk merubah pandangan patriarki yang melekat pada dirinya, sehingga perempuan Banyuwangi mampu bangkit sebagai seorang pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pembebasan perempuan Banyuwangi dalam menuju kekuasaan sebagai pemimpin di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Strategi politik perempuan di Banyuwangi didasari atas aspek planning: dimana perempuan Banyuwangi sebelum masuk ke dunia sosial politik mereka telah memiliki perencanaan yang sangat matang; aspek organizing: dimana perempuan Banyuwangi sudah mengembleng dirinya untuk masuk ke dalam organisasi; aspek actuating: dimana perempuan Banyuwangi melaksanakan strategi kemenangannya dengan bertahap dan sistematis; dan aspek controlling: dimana perempuan Banyuwangi tidak melaksanakan pengawasan secara optimal. Selain pada keempat aspek diatas, terdapat pula aspek strenghts: dimana perempuan Banyuwangi cenderung ambisius meningkatkan kemampuannya; aspek weakness: kaum laki-laki cenderung tidak setuju dengan pemimpin perempuan; aspek opportunities: dimana perempuan Banyuwangi telah berpendidikan dan berpengalaman; dan aspek threatments: dimana kaum laki-laki di Banyuwangi menerima perempuan politik, sehingga tidak ada ancaman bagi pemimpin perempuan.

**Kata Kunci:** Perempuan, Politik Sarinah, Politik Pembebasan, Banyuwangi

---

### Pendahuluan

Dalam sejarah menuju kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan jalan yang panjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan tentu tidak terlepas dari bentuk pengabdian, pengorbanan dan peran

putra-putri bangsa. Laki-laki dan perempuan memiliki andil yang sama atas kemerdekaan Indonesia. Dapat dipahami bahwa keberadaan perempuan dalam perjuangan merupakan sumber daya potensial apabila diberi kesempatan untuk maju dalam rangka

meningkatkan kualitasnya secara mandiri, sekaligus menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa. Namun faktanya bahwa secara kultural perempuan masih dibelenggu oleh budaya dimana akses dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan politik masih rendah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah cukup luas yakni 5.782,50 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 183.396,34 ha atau 31,72% daerah kawasan hutan, 66.152 ha atau 11,44% area persawahan, 82.143,63 ha atau 14,21% area perkebunan, 127.454,22 ha atau 22,04% area permukiman dan sisanya merupakan area jalan, ladang dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 didiami oleh 1.692.324 jiwa, dengan kepadatan sebesar 292,66 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan kata lain rata-rata setiap km<sup>2</sup> di Kabupaten Banyuwangi didiami sebanyak 293 jiwa. Berbicara mengenai perempuan, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi tercatat jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banyuwangi sebanyak ±803.835 jiwa selama tahun 2016-2017, dengan perbandingan jumlah laki-laki lebih sedikit yakni sebanyak ±795.976 jiwa.

Mendeskripsikan peran perempuan Sukarno menghormati perempuan desa yang menjadi pengasuhnya saat masih kecil, yang selanjutnya diketahui bahwa perempuan itu bernama Sarinah.

Kesan yang diberikan oleh Sarinah pada Sukarno kecil tersebut, memberikan dampak yang besar kepada Sukarno, sehingga pada masa setelah kemerdekaan, Sukarno memberikan kursus kepada perempuan untuk memberikan pengajaran bahwa perempuan tidak harus selalu berada di belakang laki-laki. Sukarno mengajarkan peran perempuan untuk ikut berjuang dan berpolitik.

Apa yang dicita-citakan tersebut bukan tanpa alasan, karena dalam sejarah perkembangan Bangsa Indonesia, perempuan telah mengalami berbagai bentuk penindasan: baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan yang sebelumnya mempunyai hak dan kewajiban

yang adil dan setara dalam masyarakat, dihilangkan secara paksa dengan meminggirkan dan menempatkan perempuan ke ranah domestik yang secara terus-menerus dipupuk dan dipertahankan dari masa ke masa sehingga penindasan terhadap perempuan dianggap menjadi hal yang kodrati dalam struktur sosial. Oleh karenanya pembebasan terhadap penindasan dan peminggiran peran perempuan tersebut harus dihilangkan.

Secara kuantitatif perempuan di Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah lebih besar daripada laki-laki. Sehingga dalam khasanah demokrasi politik dapat diketahui bahwa perempuan lebih memiliki andil besar dalam pemberian suara dalam pemilihan umum. Sehingga tuntutan peran dan partisipasi perempuan tidak hanya sekedar sebagai pemilih, tetapi perlu juga merekonstruksi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam bidang sosial dan politik. Oleh karenanya sangat penting apabila fenomena tersebut dikaji secara mendalam, maka penulis merumuskan masalah bagaimana strategi pembebasan dalam politik sarinah yang dilakukan perempuan Banyuwangi untuk menuju kekuasaan sebagai pemimpin di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pembebasan yang dilakukan perempuan Banyuwangi dalam menuju kekuasaan sebagai pemimpin di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Politik Sarinah**

#### **a. Konsep Politik**

Menurut Jenkins dalam Budiharsono (2003, h.1) mengatakan politik adalah himpunan nilai, ide dan norma, kepercayaan dan keyakinan seseorang atau kelompok yang mendasari penentuan sikapnya terhadap suatu kejadian dan masalah politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya.

Menurut Almond dalam Dewi (2017, h.75), politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini

disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini-siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

#### **b. Perempuan**

Menurut Sukesu (2017, h.19) banyak kesenjangan gender bagi perempuan dalam berbagai kehidupan. Bentuk-bentuk ketertinggalan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan gender seperti subordinasi terhadap perempuan, marginalisasi peranan perempuan, pandangan stereotip perempuan, beban kerja yang berlebihan pada perempuan, diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan masih belum mendapatkan sepenuhnya hak mereka untuk berkembang. Adanya subordinasi terhadap perempuan adalah sebuah posisi dimana terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peranan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Marginalisasi peranan perempuan adalah perempuan tersingkir dari berbagai kegiatan pembangunan. Pandangan stereotip perempuan adalah pandangan terhadap perempuan yang fungsi dan perannya hanya melaksanakan tugas-tugas domestik atau kerumahtanggaan. Bentuk ketidakadilan gender diatas akan menghambat kemajuan perempuan.

#### **c. Perempuan dalam Sudut Pandang Kelas Gender (Feminisme)**

Menurut Fakih dalam Rokhmansyah (2016, h.5-6) pengertian gender perlu dibedakan dari seks. Seks mengandung arti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrat memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda, dimana hal tersebut tidak dapat dipertukarkan. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Penyebab utama munculnya feminisme adalah adanya pandangan sebelah mata terhadap perempuan, disertai bermacam-macam anggapan buruk yang dilekatkan

kepadanya dan citra negatif dalam masyarakat. Feminisme mempunyai tiga pengertian, yaitu: pengakuan mengenai ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin, dengan peranan perempuan berada dibawah pria; Keyakinan bahwa kondisi perempuan terbentuk secara sosial dan maka dari itu dapat diubah; dan Penekanan pada kemandirian perempuan.

## **2. Konsep Kekuasaan**

### **a. Kepemimpinan**

Pada dasarnya kepemimpinan tidak membedakan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Bagi kedua-duanya berlaku persyaratan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun karena dalam perjalanan sejarah perempuan kurang mendapat kesempatan untuk menjalankan kepemimpinan dalam masyarakat, sekarang kita perlu meningkatkan kuantitas maupun kualitas perempuan sebagai pemimpin.

Sifat-sifat kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan Pancasila tetapi perlu memiliki ciri-ciri tentang sifat kepemimpinan modern. Diantara sifat-sifat kepemimpinan modern adalah berorientasi jauh kedepan; berlandaskan pola pikir ilmiah; berpegang pada prinsip efisien dan efektif; dan azas Selaras, Serasi dan Seimbang

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, adalah dengan meningkatkan keterampilan kepemimpinannya dan manajerialnya yang mencakup keterampilan konseptual, keterampilan hubungan antar manusia dan keterampilan teknis baik di lingkungan keluarganya sendiri maupun di lingkungan kerjanya masing-masing.

### **b. Masyarakat**

Menurut Koentjaraningrat dalam Marzali (2015, h.44) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga”.

### **c. Partisipasi Politik Masyarakat**

Menurut Budiardjo (2008, h.150) partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

### **3. Organisasi Politik Perempuan**

#### **a. Konsep Pemerintahan**

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan, pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang dapat diartikan secara luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

#### **b. Keterlibatan Perempuan dalam Politik**

Perempuan dalam proses konstruksi sosial di masyarakat memiliki peran yang bersifat domestik sehingga timbul adanya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender. Namun, perubahan kebijakan melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama.

Menurut Sukarno (2014, h.71), mengatakan bahwa “sistem kapitalis atau sistem kelas patriarkal adalah sistem terbaik untuk masa depan manusia, contohnya pasar bebas. Sedangkan matriarkal adalah peran

alami dan utama bagi perempuan, yang lain adalah nomor dua”.

Paham patriarkal menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar, laki-laki berada pada posisi lebih unggul (superior), pemegang kebijakan, memiliki akses yang luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri, dan hak-haknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun peradaban dunia.

Tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah politik atau publik justru datang dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah publik dan privat. Ideologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin yang menentukan perempuan sebagai seorang warga Negara yang bersifat privat dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik.

#### **c. Penerimaan Masyarakat Kepada Kepemimpinan Politik Perempuan**

Menurut Faraz (2013, h.13-14) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

### **4. Konsep Politik Perempuan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsepsi adalah pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran. Sehingga konsepsi dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang seseorang akan pengertian dari sebuah konsep tertentu. Konsepsi merupakan representasi mental mengenai ciri-ciri dunia luar atau domain-domain teoritik. Konsepsi adalah perwujudan dari interpretasi seseorang terhadap suatu obyek yang diamatinya.

Selanjutnya dalam mengkaji keterlibatan perempuan dalam politik lokal

di Kabupaten Banyuwangi, maka dalam penelitian ini, konsepsi politik perempuan yang diterapkan berdasarkan pada prinsip Humphrey yakni SWOT dan Terry yaitu POAC,

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Richie dalam Moleong (2007, h.6), mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti

Karena itu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pe-ngujian hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.

Fokus dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan penelitian pada konsepsi politik sarinah sebagai politik pembebasan dengan studi pada kebangkitan perempuan Banyuwangi dalam partisipasi politik local.

Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Teknik pemilihan responden yang digunakan adalah teknik *snow ball*..Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin , observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Pembahasan**

Perempuan mampu menentukan pilihan yang tepat dalam sebuah kampanye politik. Perempuan dapat membuat perencanaan strategi kampanye yang baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi lawan politiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan atau planning yang dilakukan perempuan untuk menuju kepada kekuasaannya sebagai pemimpin berdasarkan pada 2 (dua) aspek yakni yang pertama yakni aspek pengembangan diri, dimana perempuan Banyuwangi dalam menuju kekuasaan sebagai pemimpin telah merencanakan dirinya untuk dapat menguasai dengan baik bidang yang ia inginkan yakni melalui

tanjakan karir dalam pemerintahan dan yang kedua merupakan aspek strategi kampanye dimana perempuan Banyuwangi akan mempelajari dan melihat kondisi dari lingkungan, masyarakat dan lawan politiknya, sebelum akhirnya menentukan langkah apa yang akan diambil untuk memenangkan kekuasaan yang diinginkan.

Perempuan lebih mengedepankan adanya partisipatoris dari kelompok atau tim yang melaksanakan pelaksanaan strateginya, mereka hanya memberikan pengarahannya di awal dan menempatkan orang-orang yang memang sesuai dengan tugas tersebut, selanjutnya mereka mempercayakan sepenuhnya kepada tim untuk mengelola lebih jauh. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sangat menuntut bentuk partisipasi dari bawahannya, dibarengi dengan pembuatan perencanaan yang matang.

Perempuan Banyuwangi dalam melaksanakan strategi politik tetap memperhatikan perannya dalam hal domestik atau kerumahtanggaan. Perempuan Banyuwangi juga mengedepankan keahlian sebelum melaksanakan strategi politiknya, sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakannya dengan baik dan pantas. Kedua pemimpin perempuan tersebut sama-sama memberikan jawaban yang sejalan, yakni strategi politik perempuan dilakukan untuk mencapai kedudukan yang diinginkan, akan tetapi perempuan sebagai pemimpin wajib kondisi masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan strategi politik oleh perempuan, mereka cenderung apa adanya. Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada bawahannya membuat perempuan merasa tidak perlu melakukan tindak pengawasan lebih jauh. Akan tetapi, hal ini diimbangi oleh baiknya ide dan strategi yang mereka gunakan dan tetapnya pemilihan mereka akan bawahan-bawahan yang memang memiliki kriteria yang pantas, selain itu pula perempuan Banyuwangi tidak hanya sekedar memberikan ide strategi politik saja, mereka secara langsung ikut melaksanakan strategi tersebut, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai meski tanpa adanya kegiatan pengawasan yang optimal.

Artinya strategi politik perempuan di Kabupaten Banyuwangi didasari akan beberapa hal yakni ide atau gagasan atau cara yang digunakan merupakan ide dari perempuan itu sendiri, mereka cenderung memilih orang dengan selektif agar orang tersebut layak dan tepat untuk mengemban tugas yang mereka berikan, perempuan Banyuwangi melakukan strategi politik diimbangi dengan track record karir yang baik (dapat dikatakan bahwa mereka akan mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin apabila mereka merasa diri mereka pantas) dan perempuan Banyuwangi cenderung tidak melaksanakan pengawasan secara optimal dalam pelaksanaan strategi politiknya sehingga hal ini menjadi salah satu kekurangan dalam strategi politik perempuan Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi hal diimbangi dengan pengelolaan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh perempuan Banyuwangi, sehingga hasil dari strategi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Perempuan Banyuwangi memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi. Sebagai seorang perempuan, mereka terbiasa bersikap ramah kepada siapapun. Sifat lembut hati yang dimiliki perempuan membuat perempuan memiliki gaya komunikasi yang baik, yang dapat membuat lawan bicaranya dekat dengannya. Hal ini berguna bagi perempuan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk menjalani tugasnya sebagai pemimpin.

Perempuan memiliki keahlian lebih dari yang terlihat. Disamping mengurus segala keperluan rumah tangga, nyatanya perempuan mampu berkontribusi dalam mengatur keuangan keluarga dan lain sebagainya. Hal ini berarti perempuan dalam rumah tangga juga secara tidak langsung telah mempelajari keahlian manajerial, yang pastinya menjadi nilai tambah bagi perempuan pada saat menjadi seorang pemimpin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perempuan Banyuwangi memiliki kelebihan-kelebihan sebagai pemimpin yakni kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu memunculkan kepercayaan masyarakat, kemampuan manajerial dimana perempuan Banyuwangi dapat mengelola

atau mengatur pengelolaan pemerintahan dengan mengacu pada kepentingan masyarakat dan organisasi, adanya dukungan keluarga, perempuan Banyuwangi mampu meningkatkan kondisi yang ada di lingkungannya menjadi lebih baik dan perempuan Banyuwangi sebagai pemimpin di pemerintahan telah meningkatkan kemampuan soft skill yang dimiliki melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Perempuan Banyuwangi sebagai seorang pemimpin pasti memiliki kelemahan yang akan menghambat strategi politiknya. Sehingga dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kelemahan atau weakness yang dapat membatasi dan menghambat keinginan perempuan Banyuwangi tersebut. Image perempuan yang dibeda-bedakan dengan laki-laki sebagai pemimpin, pada dasarnya tidak dapat menutup jalan bagi perempuan untuk tetap mengembangkan kemampuan dirinya, begitu pula saat perempuan ingin menjadi seorang pemimpin di pemerintahan. Akan tetapi, perempuan juga harus tetap memperhatikan kehormatan agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan agama. Selain itu hal yang terpenting dilakukan oleh seorang perempuan yakni mampu melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik.

Peluang yang dimiliki oleh perempuan Banyuwangi ada 3 (tiga) yaitu kuantitasnya yang lebih besar daripada laki-laki, jenjang pendidikan yang terbuka setinggi-tingginya bagi perempuan dan pengalaman-pengalaman dalam jejak karir yang mampu ditempuh oleh perempuan, sebagai upaya dalam menunduduki kekuasaan.

Kaum laki-laki menerima adanya keinginan perempuan sebagai seorang pemimpin atau politisi. Karena tidak ada aturan yang membedakan hal tersebut. Perempuan yang fokus pada hal domestik memiliki kualitas tersendiri begitu pula dengan perempuan yang berkecimpung dalam pemerintahan. Sehingga tidak ada ancaman yang berarti bagi perempuan Banyuwangi dalam melakukan pergerakan-pergerakan politik untuk menuju pada sebuah kekuasaan baik dalam pemerintahan maupun dalam lembaga politik.

Dari hasil penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa kekuatan perempuan Banyuwangi terletak pada kemampuan berkomunikasi yang baik dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat, kemampuan mengelola kegiatan pemerintahan dengan mengacu pada kepentingan masyarakat dan organisasi, memiliki kemampuan transformasional ke perbaikan kondisi masyarakat, memiliki soft skill melalui pelatihan-pelatihan dan mendapat dukungan keluarga sepenuhnya dan dikuatkan dengan peluang dalam tingginya pengalaman dan pendidikan yang ditempuh. Meski penerimaan laki-laki terhadap keinginan perempuan sebagai pemimpin telah baik dan mendukung, akan tetapi tetap harus memperhatikan kehormatan yang dimiliki perempuan itu sendiri.

### Simpulan

Strategi politik perempuan di Banyuwangi didasari atas aspek planning: dimana perempuan Banyuwangi sebelum masuk ke dunia sosial politik mereka telah memiliki perencanaan yang sangat matang; aspek organizing: dimana perempuan Banyuwangi sudah mengembleng dirinya untuk masuk ke dalam organisasi; aspek actuating: dimana perempuan Banyuwangi melaksanakan strategi kemenangannya dengan bertahap dan sistematis; dan aspek

controlling: dimana perempuan Banyuwangi tidak melaksanakan pengawasan secara optimal.

Terdapat pula aspek strenghts: dimana perempuan Banyuwangi cenderung ambisius meningkatkan kemampuannya; aspek weakness: kaum laki-laki cenderung tidak setuju dengan pemimpin perempuan; aspek opportunities: dimana perempuan Banyuwangi telah berpendidikan dan berpengalaman; dan aspek threatments: dimana kaum laki-laki di Banyuwangi menerima perempuan politik, sehingga tidak ada ancaman bagi pemimpin perempuan.

### Saran

Perempuan Banyuwangi harus menunjukkan kepada kaum laki-laki bahwa hasil dalam kepemimpinannya sangat baik dan tidak meninggalkan peran dalam rumah tangga, sehingga kaum laki-laki setuju sepenuhnya dengan adanya perempuan sebagai pemimpin. Pemimpin perempuan perlu menjaga harkat dan martabatnya sebaik mungkin, sehingga tidak melanggar agama yang ada di Banyuwangi. Tidak adanya perbedaan antara derajat laki-laki dan perempuan di Banyuwangi, menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk kuota 30% di pencalonan anggota legislatif.

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008) **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiharsono, Suyuti S. (2003) **Politik Komunikasi**. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Dewi, Susi Fitria. (2017) **Sosiologi Politik**. Yogyakarta, Gre Publishing.
- Faraz, N. J. (2013) **Kepemimpinan Perempuan**. Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Marzali, Amri. (2015) **Antropologi dan Kebijakan Publik**. Jakarta, Prenada Media.
- Moleong, Lexi J. (2007) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016) **Pengantar Gender dan Feminisme**. Yogyakarta, Garudhawaca.
- Sukarno. (2014) **Sarinah**. Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno.
- Sukesi, Keppi. (2017) **Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan**. Malang, UB Press.